

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI  
PENGEMIS DI KOTA MATARAM**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (SI)



**OLEH :**

**Juwita**  
**NIM. 2019B1B002**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**MATARAM**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI**  
**PENGEMIS DI KOTA MATARAM**

Disusun dan diajukan oleh:

**Juwita**  
**NIM. 2019B1B002**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Mataram, 17 Oktober 2023

**Pembimbing I**

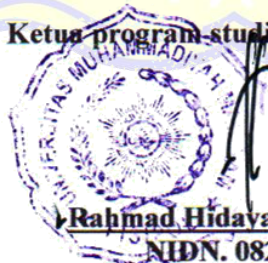
**Dr. H. Muhammad Ali., M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

**Pembimbing II**

**Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
**NIDN. 0822048901**

**Mengetahui,**

**Ketua program studi administrasi publik**



**Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
**NIDN. 0822048901**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI  
PENGEMIS DI KOTA MATARAM**

Oleh :

**Juwita**  
**NIM.2019B1B002**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 31 Oktober 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji

**Dr. H. Muhammad Ali., M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

  
Ketua


**Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
**NIDN. 0822048901**

  
Anggota I

**Drs. H. Mustamin H. Idris, MS**  
**NIDN. 0031126484**

  
Anggota II

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Dr. H. Muhammad Ali., M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

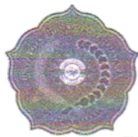
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 21 Maret 2024  
Mahasiswa

Juwita  
2019B1B002







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUWITA  
NIM : 2019B1B002  
Tempat/Tgl Lahir : Sangia, 05 Oktober 2000  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 085333770218  
Email : 21494196@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PERKEMIS  
DI KOTA MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, KAMIS 21 MARCH 2024  
Penulis

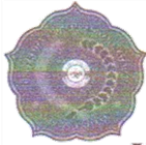
Mengetahui  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Juwita  
NIM. 2019B1B002

Iskandar, S.Sos., M.Ady  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUWITA  
 NIM : 2019B1B002  
 Tempat/Tgl Lahir : SANGIA, 05 OKTOBER 2000  
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
 Fakultas : FISIPOL  
 No. Hp/Email : 085333770218 / juwita196@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PERUNGKEMIS  
 DI KOTA MATARAM

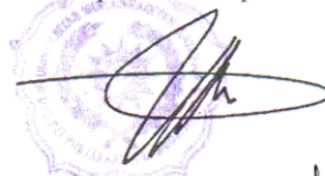
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Kamis, 21 Maret .....2024  
 Penulis



JUWITA  
 NIM. 2019B1B002

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. edy  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

Berhentilah duduk bersama orang-orang yang berbicara buruk tentang orang lain.  
Karena ketika kamu berdiri dan meninggalkan kursimu maka kamulah yang akan  
menjadi topik berikutnya dalam cerita mereka.

“berkata yang baik adalah sedekah”

Hr. Bukhari



## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang sangat mendalam serta Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali., M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik dan sekaligus dosen Pembimbing I.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing II.
4. Orang tua tercinta yang telah mengasuh saya dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan serta motivasi, terimakasih juga untuk kakak-kakak dan ipar-ipar saya yang telah memberikan dukungan dan nasehat untuk saya, dan untuk kalian adik-adik tercinta saya yang terus memberikan semangat kepada saya, terima untuk setiap candaan dan lelucon lucu yang telah kalian berikan sehingga membuat saudara-saudara mu tersenyum, untuk adik-adikku teruslah berjuang untuk menggapai kesuksesan dan impian kalian.

Mataram, 5 Desember 2023

**Juwita**  
**2019B1B002**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahhmatullahi Wabbarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Watta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram**” dan tidak lupa shalawat beserta salam saya haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhir kelak.

Dalam skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

5. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Dr. H. Muhammad Ali., M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik dan sekaligus dosen Pembimbing I.
7. Bapak Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing II.
8. Orang tua tercinta yang telah mengasuh saya dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan serta motivasi, terimakasih juga untuk kakak-kakak dan ipar-ipar saya yang telah memberikan dukungan dan nasehat untuk saya, dan

untuk kalian adik-adik tercinta saya yang terus memberikan semangat kepada saya, terima untuk setiap candaan dan lelucon lucu yang telah kalian berikan sehingga membuat saudara-saudaramu tersenyum, untuk adik-adikku teruslah berjuang untuk menggapai kesuksesan dan impian kalian.

9. Teman-teman, senior-senior dan seorang yang istimewa yang terus memberikan semangat dan dukungan untuk saya.

Semoga bantuan, kebaikan, motivasi dan semangat yang telah Bapak dan Ibu, teman-teman serta sahabat yang telah membantu semoga diberikan amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca.

Mataram, Juni 2023

Penulis,

**Juwita**

## **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENAGGULANGI PENGEMIS DI KOTA MATARAM**

Nama Peneliti : Juwita (2019B1B002)  
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Ali., M.Si  
Pembimbing II : Rahmad Hidayat, S.AP.M.AP

### **ABSTRAK**

Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan, keterampilan, kesehatan, pengaruh pola pikir, budaya masyarakat, terbatasnya atau ketiadaan lapangan kerja dan sebagainya yang akhirnya banyak diantara masyarakat demi mempertahankan hidupnya terpaksa ditempat umum menjadi pengemis.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah peran dinas sosial dalam menanggulangi pengemis di kota mataram? dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam menanggulangi pengemis di kota Mataram?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk membantu menggambarkan fenomena sosial secara detail. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengatasi masalah sosial, salah satunya untuk mengsejahterakan para pengemis yang ada di kota Mataram. walaupun sebenarnya tidak ada yang murni pengemis karena rata-rata mereka masih memiliki tempat tinggal dan pekerjaan lain yaitu memulung. Untuk melaksanakan tugas pemerintah tersebut dinas sosial untuk melakukan tugas tersebut tidak lepas dari pendataan, pembinaan pencegahan dan rehabilitas. a)Pendataan yang dilakukan ialah dengan melakukan razia ditempat mereka melakukan kegiatannya untuk mengemis, mengunjungi tempat mereka tinggal dan mendata. Apabila mereka berasal dari luar kota mataram maka akan di pulangkan melalui kelurahan. b) Pencegahan yang dilakukan oleh dinas sosial yakni mereka memberikan himbauan di setiap lampu merah agar tidak memberi uang pada pengemis, mereka yang terjaring razia akan dibawa ke posko dinas sosial untuk di berikan bimbingan agar tidak turun kejalan. Pemberian bantuan juga merupakan bagian dari pembinaan pencegahan. c )Rehabilitas upaya yang dilakukan dinas sosial untuk mengembangkan kualitas atau potensi dalam diri para pengemis melalui sistem panti asuhan maupun luar panti. Rehabilitas dilakukan dengan menyekolahkan mereka bagi yang masih ingin bersekolah dan pemberian tempat usaha.

**Kata Kunci : Dinas Sosial, Pengemis, Kota Mataram**

**THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN TACKLING BEGGARS IN THE CITY OF MATARAM**

*Researcher Name* : Juwita (2019B1B002)

*Supervisor I* : Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

*Supervisor II* : Rahmad Hidayat, S.AP.M.AP

**ABSTRACT**

*Social welfare problems are a social reality of society that is influenced by various factors such as poverty, low education, limited knowledge, skills, health, the influence of mindset, community culture, limited or no employment opportunities, and so on, which ultimately many of the community to maintain their lives are forced in public places to become beggars. e research question addressed in this study pertains to the function of social service in addressing the issue of beggars in the urban area of Mataram. What are the barriers to addressing the issue of beggars in the city of Mataram? This research uses qualitative research methods described descriptively to help explain social phenomena in detail. Data collection techniques are carried out through interviews, documentation, and observation. e study results, one of the ways to overcome social problems is to prosper the beggars in the city of Mataram. However there are no pure beggars because, on average, they still have a place to live and other jobs, namely scavenging. To carry out this government task, the social service to carry out this task cannot be separated from data collection, preventive guidance, and rehabilitation. a) The data is collected by conducting raids where they carry out their activities to beg, visiting where they live, and recording. They will be sent home through the village if they come from outside Mataram. b) Prevention carried out by the social service is that they appeal at every red light not to give money to beggars. Those caught in the raid will be taken to the social service post to be guided so as not to go down the street. Assisting is also part of preventive guidance. c )Rehabilitation efforts made by social services to develop the quality or potential in beggars through the orphanage system and outside the orphanage. Rehabilitation is carried out by sending them to school for those who still want to go to school and providing a place of business.*

**Keywords: Social Service, Beggars, Mataram City**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM





## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO .....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Peran dan Penanggulangan .....	11
2.2.1 Pengertian Peranan .....	11
2.2.2 Pengertian Penanggulangan .....	12
2.3 Konsep Pengemis .....	15
2.3.1 Pengertian Pengemis .....	15
2.3.2 Kriteria pengemis .....	16
2.3.3 Faktor Penyebab Munculnya Pengemis .....	17
2.3.4 Undang-undang Perlindungan Anak di bawah Umur Sebagai Pengemis .....	19
2.4 Dinas Sosial .....	21
2.5 Kerangka berpikir .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>3.3 Teknik Pemilihan Informan.....</b>	<b>24</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>25</b>
<b>3.5 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>27</b>
<b>3.6 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>28</b>
<b>3.7 Uji validitas Data .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>4.1.1 Profil Dinas Sosial Kota Mataram .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1.2 Letak Geografis.....</b>	<b>32</b>
<b>4.1.3 Identitas Kantor Dinas Sosial Kota Mataram .....</b>	<b>34</b>
<b>4.1.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.5 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial di Indonesia .....</b>	<b>36</b>
<b>4.1.6 Satuan Tugas (Satgas) .....</b>	<b>36</b>
<b>4.2 Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram .....</b>	<b>37</b>
<b>4.2.1 Pendataan .....</b>	<b>42</b>
<b>4.2.2 Pembinaan Pencegahan.....</b>	<b>46</b>
<b>4.2.3 Usaha Rehabilitas.....</b>	<b>47</b>
<b>4.3 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 jumlah Gelandangan dan Pengemis penerima Bantuan Sosial .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Jumlah Pengemis setiap tahun .....	39
Tabel 4.2 Jumlah Pengemis Yang Terjaring .....	44
Tabel 4.2 Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial .....	58
Tabel 4.3 Bahan Bantuan Yang Di Berikan Kepada Pengemis .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.5 Kerangka Berpikir .....	23
4.1.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram .....	36





## DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian .....	67
Peraturan Daerah Tahun 2012 .....	71



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu negara, pembangunan merupakan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena berkembangnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh kemampuan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.

Menurut Murdani dan Hadromi dalam (Aprilyanti *et al.*,2021), “Pembangunan adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bagian dari rantai pembangunan”. Proses perubahan ke arah yang lebih baik, akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dan bertujuan agar pembangunan terlaksana sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perlawanan di kalangan masyarakat jika hal tersebut terjadi.

Permasalahan jaminan sosial merupakan realitas sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pengetahuan, keterampilan, kesehatan, pengaruh pemikiran, budaya masyarakat, urbanisasi, terbatas atau tidak adanya kesempatan kerja, dan lain-lain, akhirnya memaksa banyak orang untuk bertahan hidup di tempat umum untuk bertahan hidup. Rendahnya standar hidup ini secara langsung mempengaruhi tingkat

kehidupan moral dan harga diri mereka yang tergolong miskin (Hartono, 2008 dalam Putra dkk., 2018).

Fenomena pengemis di perkotaan bukanlah permasalahan baru dalam pembangunan, namun keberadaannya perlu diperhatikan. Artinya kebijakan mengenai perlakuan terhadap pengemis juga turut menentukan ada atau tidaknya pengemis tersebut di suatu daerah (Riszi Indah Dewi Shara *et al.*, 2019).

Maraknya fenomena sosial yang melibatkan pengemis dengan berbagai cara untuk mengemis, mulai dari berpura-pura cacat hingga menggendong bayi dan anak kecil, di Indonesia bukan saja orang dewasa dan orang tua yang menjadi pengemis, anak-anak di bawah 18 tahun juga ikut menjadi pengemis itu adalah keinginan mereka sendiri atau dorongan orang lain (Putra *et al.*, 2018).

Sacara umum Pengemis dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan atau perilaku minta-minta untuk memperoleh penghasilan yang dilakukan ditempat umum dengan cara menjangkitkan atau mengandalkan iba orang lain terhadapnya (Putri, 2021). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pengemis/mengemis bukanlah suatu kata dasar dan memang tidak memiliki, akan tetapi pengertiannya bisa dua yaitu meminta-minta sedekah dan merendahkan dirinya.

Berdasarkan ketentuan didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana bermakna melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan di Indonesia diatur pada Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah No. 5

Tahun 2012. Adapun penjelasan pasal 504 KUHP menjelaskan pengertian kegiatan minta-minta atau mengemis ditempat umum sebagai berikut:

- a. Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu.
- b. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Selanjutnya ketentuan pasal 505 KUHP menegaskan pengertian kegiatan pergelandangan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan.
- b. Perlancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari enam belas tahun, dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang meliputi usaha Preventif, Represif, Rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi atau mencegah meluasnya pengaruh akibat dari pengemis dan gelandangan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali pengemis dan gelandangan menjadi anggota masyarakat yang menghargai diri sendiri, serta memungkinkan pengembangan diri untuk pengemis dan gelandangan untuk memilih kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.



Maraknya jumlah pengemis ditengah-tengah kota besar tentu mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan kota yang pada akhirnya mengemis dan jadi gelandangan bukan nasib tapi pilihan mereka (Maulana, 2013). Pengemis di Kota Mataram pada umumnya sama dengan pengemis-pengemis lain yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Kehadiran pengemis dan gelandangan telah menjadi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan masyarakat. Ada pula yang menganggap para pengemis dan gelandangan mempunyai citra negatif yang dapat merusak ketertiban, keindahan, moralitas dan kedamaian dalam masyarakat. Mereka biasa terlihat mangkal di sudut lampu merah, tempat ibadah, pusat keramaian, permukiman dan lokasi lainnya yang dianggap strategis.

Tabel.1.1 Jumlah pengemis penerima bantuan sosial:

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	10 Orang	10 Orang	10 Orang

*Sumber Data: Kantor Dinas Sosial Kota Mataram*

Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 tahun 2012 tentang penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram menjelaskan pada umumnya Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan

inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Untuk mempercepat penanggulangan pengemis, anak jalanan dan gelandangan dibutuhkan penetapan sasaran yang tepat, rancangan dan integrasi program, pemantauan dan evaluasi, serta efisiensi anggaran, diperlukan untuk mempercepat pemberian layanan bagi pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Oleh karena itu, perlu tindakan koordinasi terpadu antar pelaku kepentingan untuk mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan pengemis, anak jalanan dan gelandangan.

Penjaminan mencakup penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 mengenai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ialah landasan bagi kota Mataram dalam menangani menanggulungan kemiskinan.

Pembagian permakanan untuk keluarga miskin adalah upaya menangani masalah pengemis, kampanye “anti-memberi” diharapkan dapat memberi efek jera para pengemis karena tidak ada yang memberi, sampai dengan operasi penggarukan, yaitu metode pengakutan dan pemindahan paksa para pengemis yang di lakukan oleh dinas sosial berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Keberhasilan dalam menanggulangi pengemis bisa mewujudkan stabilitas nasional, khususnya stabilitas dalam bidang keamanan dan pertahanan sehingga dibutuhkan penanganan yang serius oleh seluruh komponen baik pemerintah, masyarakat, organisasi sosial maupun lembaga sosial masyarakat (LSM).

Dinas sosial kota Mataram guna untuk menertibkan dan mengamankan kota Mataram dari adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya untuk menanggulangi dari adanya pengemis di kota Mataram. Maka dari itu dinas sosial kota Mataram membentuk suatu tim Satuan Tugas (SATGAS) yang bertugas untuk mengamankan dan mengawasi setiap tempat dimana tempat mereka bertugas, sebagaimana yang telah dijadwalkan.

Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Mataram Nomor 047.c Tahun 2014, menunjuk dengan memperhatikan Peraturan Walikota Mataram Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 mengenai penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Mataram.

Selain untuk mengawasi dan menertibkan dari adanya pengemis dan gelandangan satgas dinas sosial kota Mataram juga bertugas untuk menertibkan adanya ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang meresahkan masyarakat, anak punk, Anak Jalanan (Anjal), di sejumlah simpang empat dan ruas jalan yang ada di Kota Mataram. Anak jalanan adalahh anak yang sebagian besar waktunya hidup dijalanana, mencari nafkah atau berkeliaran dijalanana tempat umum.

Salah satu fungsi pelayanan sosial adalah mencakup kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa cara yang dilakukan dinas

sosial terkait pemberantasan pengemis di kota Mataram, antara lain dengan melakukan sosialisasi larangan memberikan uang kepada pengemis melalui imbauan melalui artikel yang dipasang di setiap sudut lampu merah dan beberapa persimpangan. Selain itu, penggerebekan juga dilakukan terhadap pengemis lalu dipulangkan ke daerah asalnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dinas sosial kota Mataram akan melakukan upaya, antara lain memberikan pembinaan dan keterampilan kepada pengemis agar berhenti mengemis. Mengingat mengemis merupakan permasalahan yang memerlukan penyelesaian sosial ekonomi, hal ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial ekonomi dan solusi yang dapat diusulkan adalah dengan mengembangkan potensi individu atau potensi lingkungan yang dapat dikembangkan di daerah melalui pemberdayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis di dalam penelitian ini tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan sebenarnya terkait **“Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti agar lebih terarah dengan sasaran yang di miliki ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram dan faktor-faktor yang menjadi penghambat yang menjadi permasalahan pada Pengemis di Kota Mataram.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Administrasi Publik pada Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### 2. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sendiri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam pemberantasan mengemis di Kota Mataram.

#### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tertulis dan dapat dijadikan referensi bagi instansi setempat khususnya Dinas Sosial Kota Mataram.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian Pentingnya “Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram” peneliti melakukan peninjauan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut baik berupa Skripsi, Tesis maupun Disertasi. Dalam hal ini peneliti juga melihat dari penggunaan Teori yang di gunakan dan Metodologi apa yang pakai oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian peneliti mempunyai perbandingan akan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Penelitian terdahulu yang peneliti kutip merupakan skripsi dan jurnal yang berjudul sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama /Tahun/ Judul	Hasil	Persamaan/Perbedaan
1.	Ghita Dwi Putra 2021 “Analisis Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru”	Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pembinaan terhadap para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, namun pembinaan yang dilaksanakan terkesan kurang maksimal, dalam hal ini diberikan oleh dinas sosial kota Pekanbaru atau aparat sipil negara. Unit pelayanan kepolisian, baik penasehat, penjabat atau pelatihan. Karena masih adanya sebagian warga Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan informasi mengenai imbauan atau sosialisasi larangan menyumbang kepada gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal dalam implementasi dan penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 berkaitan dengan Ketertiban	Perbedaan dan persamaan penelitian, persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pada judul juga memiliki kesamaan membahas tentang pengemis. Perbedaannya hanya terletak pada penelian terdahulu juga tentang gelandangan, dan juga analisis pada judul.

		Sosial dan Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mempunyai shelter sementara (rumah singgah) namun belum ada balai atau shelter khusus sebagai tempat orientasi bagi para gelandangan dan pengemis	
2.	Andi Cudai Nur 2021 “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis”	Kesimpulannya, mengenai peran Dinas Sosial terhadap perlakuan pengemis dikota Makassar, kurang berperan terhadap pengemis. Dari ketiga indicator yang peneliti gunakan untuk mengkaji peran dinass sosial kota Makassar, hanya indeks katalik yang menunjukkan kinerja optimal, sedangkan indeks pemberdayaan dan tata kelola kurang berperan dalam pengelolaan pengemis.	Persamaan dengan peneliti ini ialah sama-sama menggunakan metode peneltian kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian.
3.	Hafiz Sutrisno 2020 “Tanggung Jawab Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Pekanbaru”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis berpendapat bahwa selain kurangnya ide dan sanksi bagi para gelandangan dan pengemis tidak mengikuti pelatihan, pelatihan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan fungsi para gelandangan dalam masyarakat agar dapat hidup. biasanya di lingkungan mereka. Hal ini menyulitkan Dinas Sosial Pemakaman Kota Pekanbaru yang harus memberikan bimbingan efektif bagaimana tetap meminta uang di tempat umum dan menentukan apakah gelandangan dan pengemis berhak mendapatkan pengobatan mandiri atau tidak.	Perbedaan dan persamaan penelitian, persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pada judul juga memiliki kesamaan membahas tentang pengemis. Perbedaanya hanya terletak pada penelian terdahulu juga tentang gelandangan, dan juga analisis pada judul.
4.	Miratun Hayati 2017 “Peranan Dinas Sosial dalam Menanggualangi Penyandang Masalah Kesejahteraan”	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menjalankan perannya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial (pengemis) mempunyai beberapa program yaitu program pengembangan keterampilan menjahit dan penyuluhan keagamaan, pelatihan bagi pengemis di lokasi ziarah Makam Sunan Gunung Jati yang jumlahnya semakin berkurang dan mengurangi pengemis, yang kedua, upaya untuk mengatasi masalah pengemis, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan upaya khususnya dengan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial serta tiga unsur yang bermanfaat bagi munculnya pengemis yaitu faktor individu, faktor sosial, faktor budaya dan struktural.	Adapun persamaan dari penelitian ini, yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif dan judul yang hampir sama. Sedangkan perbedaanya terletak pada rumusan masalah, lokasi dan terori yang digunakan.

*Sumber: berbagai jurnal dan skripsi*

Dari berbagai penelitian yang peneliti angkat memiliki kesamaan dan perbedaan. Letak persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat ialah sama-sama meneliti mengenai pengemis. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti angkat dari berbagai skripsi dan jurnal diatas ialah bahwa peneliti lebih berfokus pada pentingnya Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis.

## **2.2 Peran dan Penanggulangan**

### **2.2.1 Pengertian Peranan**

Kata peran dalam kamus bahasa Indonesia artinya “pemain sandiwar”. Sedangkan peranan seperangkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis jabatan, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, kemudian ia menjalankan suatu peran (Segara, 2019). Peran juga dapat dipahami sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peran yang sesuai dipelajari melalui proses sosialisasi kemudian diambil alih oleh individu.

Peran yang melekat pada seseorang harus dibedakan dalam interaksi sosial. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan unsur tetap yang mewakili kedudukan individu dalam masyarakat, peran mewakili lebih banyak fungsi, penyesuaian diri dan merupakan suatu proses. Jadi jika seseorang memegang suatu kedudukan dalam masyarakat dan memegang peranan tertentu. Peran tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupannya di masyarakat.
- b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dicapai individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peran juga dapat dilihat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Linton, peranan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis, yakni peran yang diberikan atau ditentukan (*ascribed*) dan peran yang diperjuangkan (*achived*). Peran yang ditentukan berarti peran-peran yang tidak merupakan hasil prestasi dirinya atau hasil usahanya, melainkan semata-mata karena pemberian dari orang lain.

Setiap penelitian pasti memiliki teori yang digunakan dalam mengupas masalah, dimana yang di sebutkan (Kerlinger, dalam Segara, 2019), menjelaskan bahwa. Teori ialah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proporsi yang berfungsi guna melihat fenomena secara sistematis, dengan melalui Spesifikasi hubungan antara variabel, hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang terjadi.

### **2.2.2 Pengertian penanggulangan**

Penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi.



Kemudian ditambah awalan “pe” dengan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, melawan, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan baik secara preventif dan refresif.

Terkait permasalahan yang dihadapi pengemis, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis untuk mencapai sistem perekonomian yang memihak masyarakat kurang mampu. Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan menyebarnya permasalahan penyebab terjadinya pengemis. Sebagaimana usaha dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Usaha Pembinaan Pengemis

- a. Pendataan

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, klarifikasi tentang pengemis dengan cara pendekatan terhadap keluarga atau masyarakat sekitar.

- b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber penyebab adanya pengemis dilaksanakan oleh organisasi pelayanan sosial atau instansi terkait dan masyarakat dengan cara:

- 1) Melakukan patroli ditempat umum yang dilakukan oleh tim satgas Sosial Kota Mataram.
  - 2) Memberikan informasi mengenai keberadaan pengemis yang melakukan aktifitas ditempat umum secara perseoranga atau berkelompok.
  - 3) Penyuluhan, Penyuluhan tersebut dimaksudkan untuk mengajak dan mempengaruhi individu atau kelompok agar melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengemis.
2. Usaha Pananggulangan
- Usaha penanggulangan adalah usaha untuk meminimalisir atau untuk membebaskan tempat-tempat umum dari pengemis yang di tunjukkan kepada seseorang maupun kelompok. Usaha penaggulangan diantaranya sebagai berikut:
- a. Razia, dilakukan melalui sosialisasi kepada pengemis yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
  - b. Perlindungan yang dilakukan dinas sosial bekerja sama dengan unsur satpol PP atau dengan masyarakat terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  - c. Akomodasi sementara dilaksanakan dalam rangka orientasi yang dilaksanakan oleh suatu sistem pranata sosial yang meliputi orientasi sosial, orientasi spiritual, orientasi hukum, dan permainan adaptasi sosial (ekstrovert) dengan menjamin hak asasi manusia.
  - d. Pendampingan sosial dilakukan melalui pengarahan perorangan terhadap pengemis serta keluarga secara rutin.

### 3. Usaha rehabilitas sosial

Upaya rehabilitasi sosial merupakan proses memfungsikan kembali sistem kehidupan masyarakat dan meningkatkan tingkat perlindungan sosial terhadap pengemis. Upaya rehabilitasi sosial dilakukan agar para pengemis dapat memperoleh penghidupan dan kehidupan yang bermartabat dan bermartabat melalui dukungan mental dan spiritual untuk meningkatkan kesadaran mereka agar tidak lagi asyik mengemis di tempat umum.

## 2.3 Konsep Pengemis

### 2.3.1 Pengertian Pengemis

Sacara umum pengemis dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan atau perilaku minta-minta untuk memperoleh penghasilan yang dilakukan ditempat umum (Putri, 2021). Dalam kamus besar bahasa indonesia kata pengemis/mengemis bukanlah suatu kata dasar dan memang tidak memiliki, akan tetapi pengertiannya bisa dua yaitu meminta dengan merendahkan dirinya dan meminta-minta sedekah.

Ketentuan terkait mengemis sebenarnya telah diatur dalam KUHP saat ini namun dengan tingkat ancaman pidana yang berbeda, yaitu:

- a. Pasal 504 ayat (1) mengatur: Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu.

- b. Pasal 504 ayat (2) mengatur: Pengemis yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan.

Gepeng telah membuat pemerintah kota Mataram mengeluarkan kebijakan dengan harapan bisa terlaksananya penanganana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Mataram. Penegakan peraturan Walikota Mataram yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial ini berdasarkan No 5 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Gelandangan dan Pengemis (Nasir *et al.*,2022).

Weinberg memaparkan bagaimana pengemis yang masuk dalam kategori kemiskinan di perkotaan seringkali menghadapi diskriminasi dan stigma negatif. Terkait hal ini, Rubington dan Weinberg berpendapat bahwa stigma negatif justru mengasingkan masyarakat dari kelompok masyarakat umumnya (Tangdilintin, 2000 dalam Putri, 2021).

### **2.3.2 Kriteria pengemis**

Menurut Fadri (2019) ada beberapa kriteria dari gelandangan dan pengemis, diantaranya yakni:

- 1) Tidak punya tempat tinggal. Kebanyakan gelandangan dan pengemis tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat berlindung. Mereka sering berkeliaran di tempat umum. Mereka tidak punya tempat tinggal, seperti di bawah jembatan, rel kereta api, gubuk liar di tepi sungai, etalase toko, dan lain-lain.

- 2) Hidup dalam ketidakpastian. Para tunawisma hidup dan mengemis setiap hari. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena jika mereka sakit, mereka tidak berhak atas tunjangan jaminan sosial seperti masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, dan lain-lain.
- 3) Hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat bercerai berai tanpa penghasilan tetap untuk menjamin kehidupannya di masa depan, bahkan harus mengemis, memungut sampah setiap hari, bahkan melakukan perbuatan tercela seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya.
- 4) Tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan stabil seperti menggali puntung rokok atau menarik gerobak.
- 5) mengenakan pakaian compang-camping. Gepeng biasanya tidak pernah memakai pakaian rapi atau berdasi, melainkan memakai pakaian lusuh dan kotor.
- 6) Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.
- 7) Tuna etika, dalam arti bertukar istri dan suami, hidup bersama, berdagang istri, dan sebagainya.
- 8) Mengemis di depan umum. Seperti halte bus, stasiun kereta api, rumah atau karakter.

### **2.3.3 Faktor Penyebab Munculnya Pengemis**

Masalah sosial mengemis ialah pengumpulan dan sambungan dari berbagai masalah seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kejuruan, lingkungan sosial budaya dan lain-lain (Siahaan, 2017). Masalah ini ialah



masalah sosial dan wabah di masyarakat. Beberapa permasalahan merupakan faktor yang ada dalam diri individu, keluarga maupun di luar masyarakat (tempat pengemis beroperasi). Faktor penyebab tersebut dapat terjadi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

### **1. Faktor internal**

- a. Kemiskinan individu dan keluarga. Kemiskinan menjadi penyebab utama terjadinya mengemis. Dasarnya, pengemis itu benar-benar miskin atau berpura-pura miskin. Beberapa pengemis mengaku menjadi pengemis karena miskin, berpenghasilan rendah, dan tidak mampu menghidupi keluarga, sehingga terpaksa mengemis.
- b. Tingkat pendidikan rendah. Masuk akal jika pendidikan akan mempengaruhi seseorang menjadi pengemis. Pendidikan yang rendah berarti seseorang cenderung tidak memiliki keterampilan tertentu sehingga tidak tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan, bukan karena tidak ada pekerjaan.
- c. Sikap mental. Keadaan mental ini juga muncul karena mereka menganggap pekerjaan yang mereka lakukan adalah hal biasa, seperti pekerjaan lain yang memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka merasa nyaman untuk mengemis. Kurangnya pendapatan, terbatasnya kendali terhadap sarana dan prasarana produksi, serta terbatasnya keterampilan, mendorong mereka untuk mengemis.

## 2. Faktor eksternal

a. Kondisi kota yang primitif sikap primitif penduduk Kota Mataram ditunjukkan dengan sikapnya yang murah hati jika terjadi melihat pengemis. Kasihan dan kepedulian terhadap masyarakat merupakan ajaran moral yang baik. Sementara di sisi lain, visi tersebut dimanfaatkan oleh para pengemis untuk semakin menarik belas kasihan orang-orang baik.

b. Urbanisasi dan Kesenjangan Pembangunan

Munculnya pengemis ialah dampak negatif dari kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan mendorong masyarakat pedesaan untuk pindah ke kota dilatarbelakangi oleh upah yang tinggi tanpa menyadari keterbatasan potensi yang dimiliki.

### 2.3.4 Undang Undang Perlindungan Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis

Mengingat konsep perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa perlindungan anak mempunyai arti yang sangat luas, khususnya melindungi hak-hak seseorang. Perlindungan tersebut mempunyai fungsi khusus agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya (Sunarto, 2022).

Sebagai tantangan hukum, persoalan gelandangan dan pengemis bisa dibawa kebidang kriminologi. Kriminologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari perkembangan dan pendewasaan perilaku yang mengarah pada kesejahteraan atau

perkembangan perilaku orang yang melakukan kejahatan. Terkait persoalan mengemis, ada hal yang sangat mengharukan ketika pelaku mengemis adalah seorang anak kecil. Anak-anak yang seharusnya bersekolah dan bermain bersama temannya malah berada di jalanan, berpindah-pindah tempat mengemis.

Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dengan kelahirannya mempunyai hak untuk hidup, mandiri dan mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan bangsanya. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang dapat merampas hak hidup dan kebebasannya.

Hak-hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi secara hukum, termasuk dalam undang-undang nasional yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi hak-hak anak, pemenuhan tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara harus melindungi anak. UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, baik perlindungan anak umum maupun perlindungan anak khusus atau perlindungan anak yang menghadapi permasalahan hukum (menjadi pelaku tindak pidana), serta hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *Internasional on Civil and Political Right* (ICPR). Bahkan hak asasi anak pun harus diperlakukan berbeda dengan hak asasi orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi khusus internasional.

Perintah yang meminta anak mengemis tidak hanya datang dari orang tua anak, tetapi juga dari beberapa pihak yang mengkoordinasikan anak mengemis tersebut.

Terlepas dari aspek siapa yang menyuruh anak melakukan pengemisannya maka Perundang-undangan di Indonesia khususnya KUHP maupun undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam pihak-pihak pelaku yang menyuruh anak melakukan pengemisannya dengan ancaman pidana.

#### **2.4 Dinas Sosial**

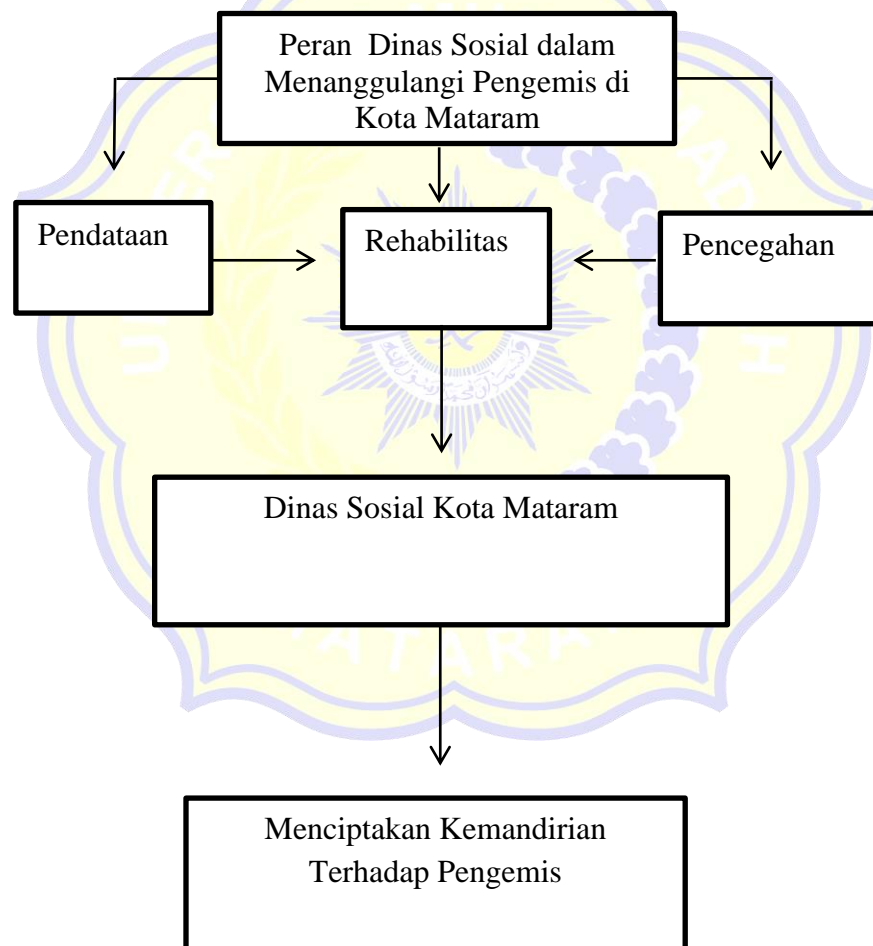
Dinas Sosial ialah instansi di bawah naungan kementerian sosial yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan fakir miskin untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain itu juga Dinas Sosial Kota Mataram adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial yang merupakan Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Dinas Sosial Kota Mataram sebagai lembaga pelaksana di bidang sosial, dalam menjalankan fungsinya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, penunjang upaya, pembinaan, pelatihan untuk meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) dalam Sugiyono (2021) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

**Tabel 2.5 Kerangka Berpikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan penelitian kualitatif dengan interpretasi deskriptif untuk membantu mendeskripsikan fenomena sosial secara detail. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan dan tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian deskriptif ini dapat diterapkan pada penelitian kuantitatif namun dapat juga bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan mengkonfirmasi fenomena sosial yang menjadi subjek penelitian.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk penyelesaian Penelitian ini terutama guna memperoleh data yang diperlukan. Penulisan ini untuk mendapatkan data yang langsung dan akurat di yakni:

##### **1) Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial Kota Mataram Provinsi NTB. Peneliti memilih Kota Mataram sebagai tempat penelitian, disebabkan oleh peneliti pernah melakukan magang atau PKL di Kantor Dinas Sosial Kota Mataram, yang kemudian di tempatkan dan berikan tugas di lapangan bersama PSM dan SATGAS Sosial Kota Mataram. Peneliti turun yang tentunya didampingi oleh Satgas sosial Kota Mataram untuk menanggulangi pengemis gelandangan dan pemulung yang ada di Kota Mataram. Dimana ada berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat

khususnya para penggemar yang tersebar di Kota Mataram, sehingga fenomena ini menarik untuk peneliti jadikan judul, dan salah satu strategi peneliti untuk mempersingkat waktu penelitian.

## 2) Waktu Penelitian

Penelitian pada bulan April sampai bulan Mei 2023, yang dilakukan pada Dinas Sosial Kota Mataram.

### 3.3 Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan penelitian ialah orang memiliki informasi terkait objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber, dalam penelitian ini untuk menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang menguasai objek yang akan peneliti teliti. Dalam *Purposive Sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentan apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek situasi sosial yang diteliti. Dan *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar” (Sugiyono, 2021).

Adapun informan yang digunakan dari subjek penelitian ini yakni :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram
2. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial
3. Satgas Sosial Kota Mataram
4. Pengemis

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

#### 1) Observasi

Observasi adalah suatu alat pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Secara umum observasi dapat dilakukan dengan dua cara:

- a) Observasi langsung merupakan suatu proses aman yang dicapai dengan mengamati secara langsung dan ikut serta dalam kehidupan orang-orang yang akan diamati.
- b) Observasi tidak langsung adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh seorang pengamat tanpa ikut serta dalam kehidupan yang diamati, yang secara unik diposisikan sebagai pengamat..

#### 2) Wawancara (interview)

Metode wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung mengenai seseorang dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Dari sudut pandang tersebut peneliti menyimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan sumber data (*responden*).

Metode ini mempunyai fungsi untuk memperjelas atau melengkapi data yang ditemui peneliti langsung di tempat kejadian. Dalam proses ini peneliti melakukan

wawancara/tanya jawab dan menjawab pertanyaan dari informan penelitian secara langsung (tatap muka).

Jenis wawancara yang digunakan peneliti yakni:

d. Wawancara terstruktur

Wawancara ini dipakai sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data mengetahui secara pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya, selain menggunakan alat-alat sebagai pedoman wawancara, pengumpulan data juga dapat menggunakan alat-alat seperti perekam audio, gambar, brosur dan bahan-bahan lain yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk wawancara.

e. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Panduan wawancara yang digunakan hanya bersifat gambaran umum permasalahan yang akan ditanyakan. Namun peneliti yang melakukan wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Materinya bisa berupa artikel, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Catatan dalam bentuk tertulis, misalnya catatan harian, kisah hidup, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, sketsa, dan lain-

lain. Dokumen berbentuk karya, misalnya karya seni dapat berupa lukisan, patung dan sebagainya.

Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong 2012) mendefenisikan tentang *record* dan *document* sebagai berikut: *record* adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ini ialah setiap bahan tertulis atau file. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan catatan secara tetulis, buku, arsip-arsip, pengalaman dan rangkain peristiwa yang anggap penting dan berguna. Dokumen untuk dijadikan informan tambahan agar melengkapi data yang di butuhkan.

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data yakni Dinas Sosial Kota Mataram.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, diagram, dan gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif, yaitu data yang dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat.

Dalam hal ini, ada dua jenis sumber data yang digunakan peneliti, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama tempat penelitian atau subjek penelitian berupa kata-kata atau ucapan, gerakan atau



perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (Siyoto, 2015). Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami kriteria, misalnya korban, pelaku, dan lain-lain. Dalam penelitian ini data utama yang akan penulis peroleh adalah dari tanggapan responden, berdasarkan pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan, baik informan kunci maupun informasi utama supplier.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari pendapat para ahli dan informasi terkait permasalahan pokok yang dianggap sebagai data awal untuk menunjang data primer (Siyoto, 2015). Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan peneliti berupa laporan temuan penelitian sebelumnya, jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan sebelum masuk lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan, Analisis telah melalui sejak merumuskan data menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis sebelum dilapangan analisis dilaksanakan pada data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan dipakai untuk menetapkan arah penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021), kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai

untuk menjenuhkan data. Kegiatan analisis datanya adalah reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan cukup besar sehingga harus dicatat secara cermat dan rinci semakin lama peneliti berada di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih unsur-unsur kunci, memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting, mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan dan mempelajarinya jika diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian ini penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif meliputi penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dicapai masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang meyakinkan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang baik dan konsisten ketika peneliti kembali ke tempat kejadian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disempurnakan adalah kesimpulan yang dapat diandalkan.

### 3.7 Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas internal), *dependability* (rebiabilitas), *confirmability* (objektivitas) (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji reliabilitas untuk memeriksa keabsahan data. Agar penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dilakukan:

#### 1) Uji Kredibilitas

Pengujian reliabilitas atau keterpercayaan data penelitian kualitatif dilakukan untuk memperluas observasi, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif dan *member check*.

##### a. Meningkatkan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti pengamatan yang lebih cermat dan terus-menerus. Untuk meningkatkan kegigihan Anda, bacalah banyak buku referensi dan hasil penelitian atau dokumen terkait temuan mendalam. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin akurat, sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi apakah data yang ditemukan akurat atau dapat dipercaya.

b. Triangulasi

William Wiersma (1989) dalam Sugiyono (2021), menyatakan Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Selain data untuk tujuan pengendalian atau perbandingan data tersebut. Hal ini membandingkan apa yang peneliti lihat dan dengar, hingga hasil penelitian tidak bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada. Teknik ini menggabungkan data dan mengekstrak informasi dari sumber penelitian.

